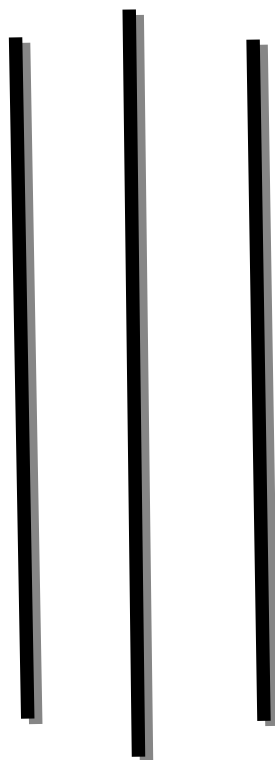




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGASEM**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 5 Maret 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Karangasem



Drs. I Wayan Sutapa, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691102 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Isu Strategis	7
1.4 Struktur Organisasi	10
1.5 Sumber Daya Manusia	12
1.6 Sarana dan Prasarana Kantor	12
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Indikator Kinerja Utama.....	25
3.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol.....	26
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	34
BAB IV	
PENUTUP	35

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA (PK) Tahun 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan salah satu unsur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian–capaian kinerja dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Di dalamnya memuat penilaian terhadap unsur perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta pencapaian kinerja.

Adapun mekanisme penyusunan laporan kinerja meliputi analisa terhadap sinergitas antara pencapaian kinerja dengan kebijakan dalam mewujudkan tujuan serta sasaran strategis OPD yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan tersebut, dilakukan evaluasi juga terhadap perkembangan capaian tujuan dan sasaran dengan menggunakan informasi atau data – data yang diperoleh secara lengkap.

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem pada Tahun 2023. Indikator Kinerja Utama merupakan outcome dari program–program utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan sebagai dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPan RB No. 29 Tahun 2010 yang diubah menjadi PermenPan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2021–2026

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2023 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

1.3 Isu Strategis

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karangasem yang aman, nyaman, dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Karangasem merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem yaitu mengantisipasi berbagai kerawanan sosial, politik yang berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memiliki visi sebagai fasilitator dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Karangasem yang aman, nyaman dan tenteram dalam menunjang pembangunan Kabupaten yang berwawasan budaya.

Upaya kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: Aspek wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang

merupakan sumber dari segala sumber hukum yang harus senantiasa menjiwai pola pandang sikap, penghayatan dan perilaku seluruh warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek Politik, yaitu substansi kebijakan politik dalam negeri diarahkan untuk memperkuat keberadaan NKRI, dengan mengembangkan sistem praktik nasional yang demokratis, berkedaulatan rakyat, terbuka serta diarahkan guna membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa Indonesia yang maju bersatu, demokratis, adil dan makmur.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyangkut :

1. Belum maksimalnya partisipasi pemilih pada pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat terlepas dari partisipasi pemilih, partisipasi pemilih akan mempengaruhi tingkat capaian kesuksesan dari pada pemilu tersebut, sehingga peningkatan partisipasi pemilih sangatlah penting dalam pemilu.

2. Masih kurangnya wawasan politik masyarakat.

Wawasan politik pada masyarakat perlu ditingkatkan dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan gambaran pada setiap provinsi di Indonesia baik berada pada tingkat demokrasi baik, sedang maupun buruk, dengan hal tersebut pemerintah pusat atau provinsi/daerah dapat memberikan prioritas pembangunan politik di daerah tersebut.

3. Belum maksimalnya komunikasi pemerintah daerah dengan partai politik. Sebagai wadah dalam melaksanakan komunikasi maupun koordinasi perlu dibentuk sebuah forum diskusi politik yaitu dalam hal pembahasan pembangunan dan pembanguna politik yang baik di daerah.

4. Belum maksimalnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam berpartisipasi untuk pembangunan di daerah. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di daerah sangat penting yaitu untuk berfartisipasi dalam pembangunan di daerah, organisasi kemasyarakatan perlu difasilitasi dan

diberikan pembinaan. Disamping itu juga Pemerintah Daerah memiliki peran menjaga keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan di daerah, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dapat diberikan melalui fasilitasi kebijakan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Belum maksimalnya pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan wajib dilakukan agar adanya kontroling pemerintah terhadap organisasi kemasyrakatan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap Ormas guna untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari ormas tersebut, pengawasan yang dilakukan beersifat eksternal.
6. Belum tuntasnya pemahaman terhadap Ideologi Negara dan rasa Nasionalisme yang ditanamkan kepada generasi muda khususnya di Kabupaten Karangasem .
7. Masih adanya potensi konflik sosial yang tinggi bersumber dari penyelesaian batas wilayah desa adat dan dinas yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat.
8. Masih rendahnya kemampuan aparat dan masyarakat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini sebagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
9. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing dan provokasi orang/kelompok yang tidak bertanggung jawab yang mengancam keutuhan Negara.
10. Masih perlunya pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi : peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa, bintek peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama, bintek peningkatan nilai luhur budaya bangsa.
11. Masih perlunya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, seperti: fasilitasi terhadap pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya, seminar peningkatan ketahanan kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan.

12. Masih perlunya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) meliputi: penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, penyuluhan berkembangnya praktik prostitusi, penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur.

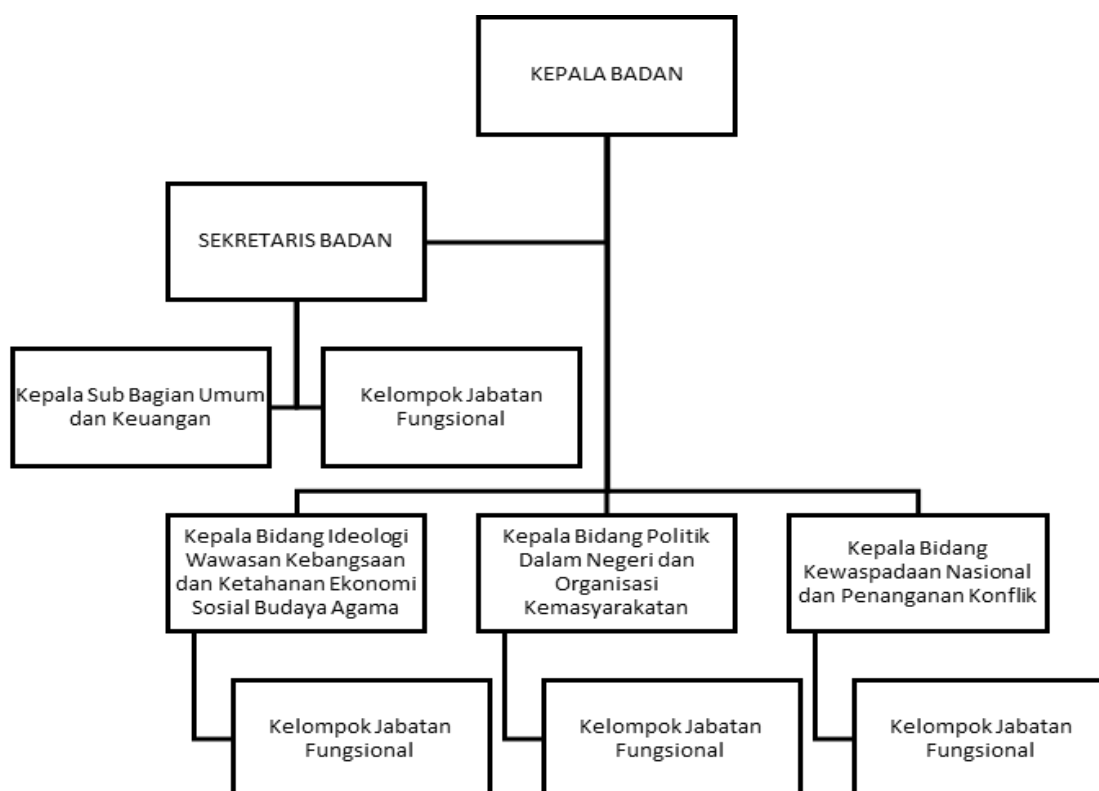
1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 63 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karangasem adalah membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Karangasem. Untuk melaksnakan tugas pokok dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

STRUKTUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



1.5 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per bulan Desember 2023 jumlah Pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem adalah 28 orang PNS dan 24 Non PNS yang terdiri dari:

1. Kepala Badan 1 Orang
2. Sekretaris Badan 1 Orang
3. KaSub Bagian 1 Orang
4. Kepala Bidang 3 Orang
5. Pejabat Fungsional 4 Orang
6. Staf PNS 18 Orang
7. Staf Non PNS 24 orang

Uraian berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah Pegawai berdasarkan latar belakang Pendidikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

Tabel 1.5
Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karangasem Menurut Kualifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan	Pegawai		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD	-/-	-/-	-
2	SMP	4	-/-	4
3	SMA/SMK	8	12	19
4	Sarjana S-1/ D-IV	14	12	26
5	Sarjana S-2	4	-/-	3
6	Doktor S-3	-/-	-/-	-
TOTAL :		28	24	52

1.6 Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Nama Aset	Jumlah Aset / kondisi	
		Baik	Kurang baik/ Rusak
1	2	3	4
1	Station Wagon	3	1
2	Sepeda Motor	11	3
3	Speed Boat		1
4	Air Conditioning	12	1
5	Rak Besi/Metal	3	2
6	Filling Besi/Metal	12	
7	Brand Kas	1	
8	Almari kayu	2	
9	Mesin Absensi	1	1
10	Rak Kayu	13	2
11	Meja Kayu/Rotan	1	5
12	Meja Rapat	16	
13	Meja Reseption	2	
14	Meja Tambahan	1	
15	Kursi	106	41
16	Meja Komputer		1
17	Meja Biro	22	
18	Sofa	4	1
19	Meja Tamu	2	
20	Wireless	2	
21	Handy Cam	4	2

No	Nama Aset	Jumlah Aset / kondisi	
		Baik	Kurang baik/ Rusak
1	2	3	4
22	Personal Komputer	22	3
23	Lap Top	10	3
24	Note Book		2
25	Hard Disk	1	
26	Printer	20	5
27	Computer Compatible	3	
28	Hardisk External	1	1
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	5
31	Proyektor + Attachment	2	2
32	Telephone Hybird	1	
33	Handy Talky	27	9
34	Facsimile	2	
35	Layar	2	

Sumber: daftar inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

IKTHISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, isu strategis, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kantor, serta sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2023.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi :

Visi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem adalah NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA MENUJU KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SHANTI DAN NADI dengan 6 (enam) misi, 22 (dua puluh dua) tujuan dan 34 (tiga puluh empat) sasaran yang meliputi 7 bidang prioritas untuk mendukung arah kebijakan dan program pembangunan Karangasem Tahun 2021-2026 sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana.

Misi :

Dari Visi, Misi dan arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem mendukung Misi ke 5 (lima) yakni Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran seperti yang telah diuraikan pada Rencana Strategis Tahun 2016–2021 disusunlah suatu perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem sepenuhnya dapat dirujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penetapan kinerja yang dibuat awal tahun 2023 telah ditetapkan dalam DPA Tahun 2023 antara dengan Kepala Badan dengan Sekretaris dan Kepala Bidang, dan antara Kepala Bidang dengan Kepala Sub bidang atau Sub bagian masing –

masing. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem yaitu :

1. Terlaksananya Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
2. Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Terlaksananya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
5. Terwujudnya Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

2.1.2 Program Kegiatan

Rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi penganggaran pemerintah daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas.

Adapun program dan kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran 2023 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah
A1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
A2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
A3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
A4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
A5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
A6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
B	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
B1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
24	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
C	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
C1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
25	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
26	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
27	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
D	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
D1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
28	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
29	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
30	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
E	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
E1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
31	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
32	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
33	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
F	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
F1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
34	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
35	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
36	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dengan telah diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, dan PermenPan RB No. 29 Tahun 2010 yang diubah dengan PermenPan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2023 memuat informasi tentang target sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem. Disamping itu dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, transparan dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;

4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai Eselon II, Eselon III, Eselon IV. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karangasem untuk Tahun 2023, secara rinci dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Indikator Kinerja Utama

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem adalah :

1. Meningkatnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan;
2. Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Terlaksananya Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

4. Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
5. Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

3.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2023, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dalam urusan pelaksanaan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik secara umum dapat dikatakan baik. Dalam pelaksanaan secara keseluruhan target kinerja sudah dapat berjalan secara optimal dari pada target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh besaran target atas indikator sasaran ada sudah mencapai 100 persen.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			
				Fisik	%	Keuangan(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah (100%)	3.749.130.408	100	100	3.612.432.989	96,35%
A1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)	49936200	100	100	49266200	98,66%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	22185600	2	100	22025600	99,28%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)	975000	1	100	905000	92,82%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)	1485000	1	100	1380000	92,93%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	1462500	1	100	1405000	96,07%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)	1950000	1	100	1805000	92,56%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (12 Laporan)	20903100	12	100	20840600	99,70%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 Laporan)	975000	1	100	905000	92,82%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			
				Fisik	%	Keuangan(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%)	2936696158	100	100	2919293490	99,41%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan (28 Orang)	2935271158	28	100	2917968490	99,41%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 Laporan)	1425000	1	100	1325000	92,98%
A3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%)	244514550	100	100	168724152	69,00%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (1 Paket)	1993700	1	100	1455000	72,98%
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan (1 Paket)	12578400	1	100	9568500	76,07%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (1 Paket)	124960300	1	100	88115200	70,51%
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (1 Paket)	20482150	1	100	19203250	93,76%
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (1 Dokumen)	15000000	1	100	14352000	95,68%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (1 Laporan)	62000000	1	100	29030202	46,82%
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (1 Laporan)	7500000	1	100	7000000	93,33%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			
				Fisik	%	Keuangan(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%)	46630000	100	100	46080000	98,82%
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (3 unit)	46630000	3	100	46080000	98,82%
A5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)	258320400	100	100	243436147	94,24%
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1 Laporan)	42961200	1	100	42131200	98,07%
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (1 Laporan)	38000000	1	100	24720747	65,05%
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (1 Laporan)	40000000	1	100	39225000	98,06%
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (1 Laporan)	137359200	1	100	137359200	100,00%
A6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)	213033100	100	100	185633000	87,14%
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya (15 Unit)	198033100	15	100	170658000	86,18%
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (15 Unit)	15000000	15	100	14975000	99,83%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			
				Fisik	%	Keuangan(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
B	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (100%)	1.656.527.250	100	100	1.365.344.650	82,42%
B1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (100%)	1.656.527.250	100	100	1.365.344.650	82,42%
24	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (350 Orang)	1.656.527.250	350	100	1.365.344.650	82,42%
C	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (100%)	19.778.461.094	100	100	19.696.902.900	99,59%
C1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (100%)	19.778.461.094	100	100	19.696.902.900	99,59%
25	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (260 Orang)	19.696.197.294	260	100	19.663.990.600	99,84%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			
				Fisik	%	Keuangan(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (40 Orang)	56.782.400	40	100	18.703.000	32,94%
27	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (1 Laporan)	25.481.400	1	100	14.209.300	55,76%
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (100%)	137.755.200	100	100	78.278.500	56,82%
D1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (100%)	137.755.200	100	100	78.278.500	56,82%
28	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (100 Orang)	83.311.000	100	100	66.121.200	79,37%
29	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (25 Orang)	17.020.000	25	100	0	0,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			
				Fisik	%	Keuangan(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (1 Laporan)	37.424.200	1	100	12.157.300	32,49%
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (100%)	361.452.700	100	100	324.986.900	89,91%
E1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (100%)	361.452.700	100	100	324.986.900	89,91%
31	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (285 Orang)	361.452.700	285	100	324.986.900	89,91%
F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (100%)	565.350.400	100	100	305.053.220	53,96%
F1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (100%)	565.350.400	100	100	305.053.220	53,96%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			
				Fisik	%	Keuangan(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (55 Orang)	258.628.900	55	100	209.269.920	80,92%
33	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (15 Orang)	19.712.100	15	100	10.092.400	51,20%
34	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota (1 Laporan)	287.009.400	1	100	85.690.900	29,86%
JUMLAH			26.248.677.052		100	25.382.999.159	96,70%

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa capaian kinerja mengalami tidak mengalami kendala sehingga target tercapai 100 Persen, dengan realisasi anggaran 96,70 Persen (Terdapat efisiensi anggaran 3,30 Persen) Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem akan melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan;
- b. Komunikasi dan koordinasi antar pemegang puncak pimpinan perlu ditingkatkan sehingga gangguan dari kebijakan politik dapat ditekan sekecil kecilnya;
- c. Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah;
- d. Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompetensi dapat diwujudkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem pada Tahun 2023 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem telah berhasil dalam melakukan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dalam capaian kinerja kegiatan dan sasarnya.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem yang telah mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian keberhasilan yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem tidak terlepas dari hambatan–hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan–hambatan dalam pencapaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2023 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 5 Maret 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Karangasem



Drs. I. Wayan Sutapa, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691102 199003 1 006